

# Dampak Sosial Ekonomi dan Kebijakan Penanganan Kasus Covid di Bali

Denpasar, 13 Mei 2020



Prepared by  
Prof. Dr. IB Raka Suardana, SE.,MM

- ▶ Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bali 2017-2020
- ▶ Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar



**SENIN, 11 MEI 2020** sd. Pukul 18.00 WITA  
Sumber : Press Release Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali

# DISIPLIN

**MENGGUNAKAN MASKER**  
*jika berada di luar rumah atau di tengah keramaian*

**MENCUCI TANGAN**  
*sesering mungkin, gunakan sabun dan air mengalir*

**MENJAGA JARAK FISIK**  
*minimal 2 m, dan hindari keramaian*

**MELAKSANAKAN KARANTINA**  
*bagi masyarakat yg memiliki riwayat perjalanan*

**#JANGANMUDIK**  
**#PUTARBALIK**  
**#DIRUMAHAJA**



**RINCIAN 11 MEI 2020**  
**SEMBUH : 6 orang WNI**  
*(4 PMI, 2 Non-PMI)*

**TERKONFIRMASI POSITIF**  
**3 WNI (2 PMI, 1 Transmisi Lokal)**



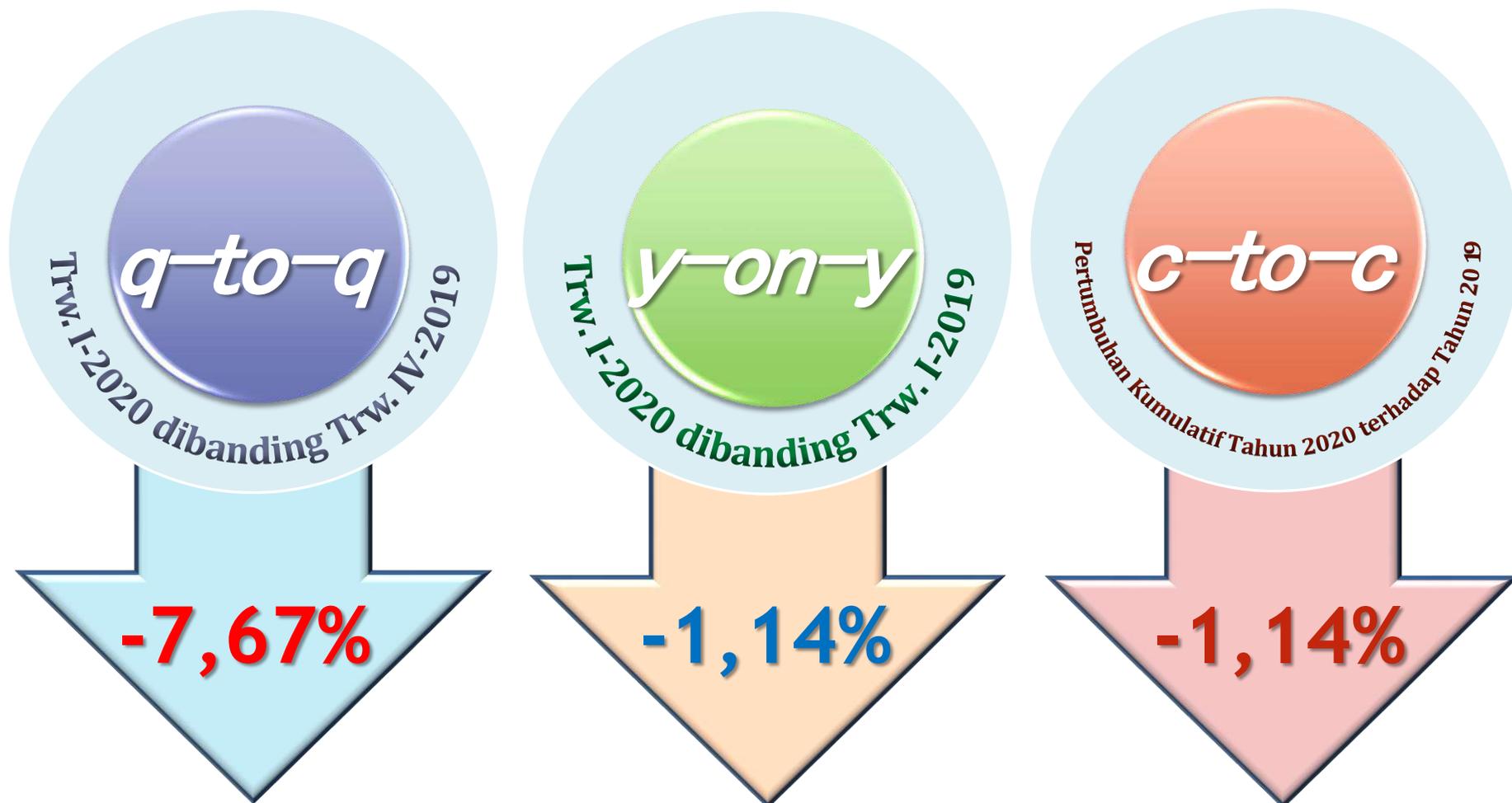
[infocorona.baliprov.go.id](http://infocorona.baliprov.go.id)

CALL CENTER

# DAMPAK PARIWISATA DI BALI LESU



Perekonomian Bali paling terburuk sepanjang sejarah Bali sebagai daerah pariwisata



**Pertumbuhan Ekonomi Bali  
Triwulan I Tahun 2020**

---

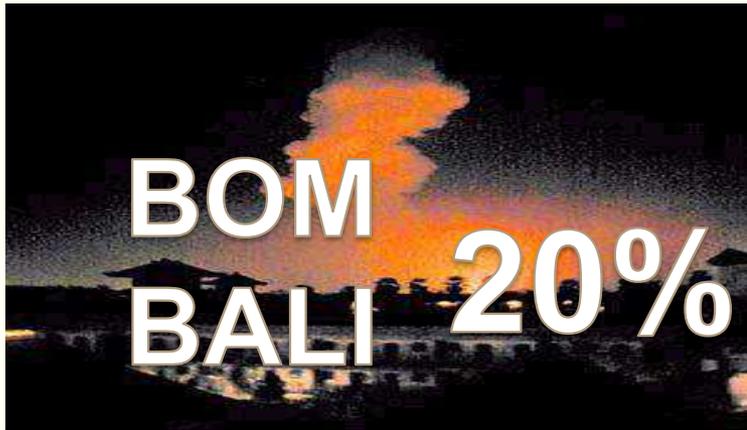
---

**COVID-19**

Lebih  
Parah



# Tingkat Hunian Hotel

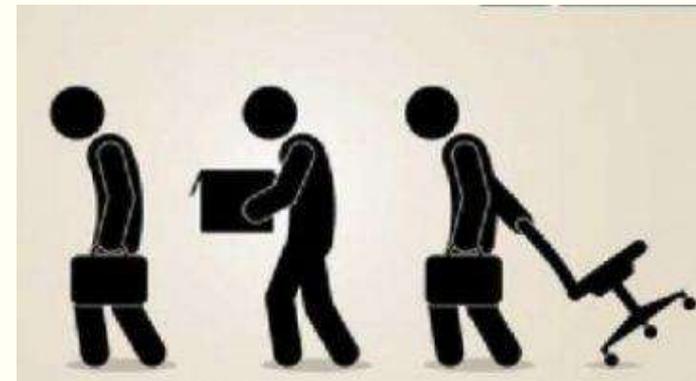




---

Dirumahkan sebanyak **63.029** orang, terbanyak di sektor pariwisata (hotel) atau penyediaan makanan dan minuman seperti restoran dan lain-lainnya

**1.806**  
**Orang**



# Skema dan Paket Kebijakan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Bali



**Realokasi Anggaran  
Tahun 2020  
Rp. 756,0 milyar**

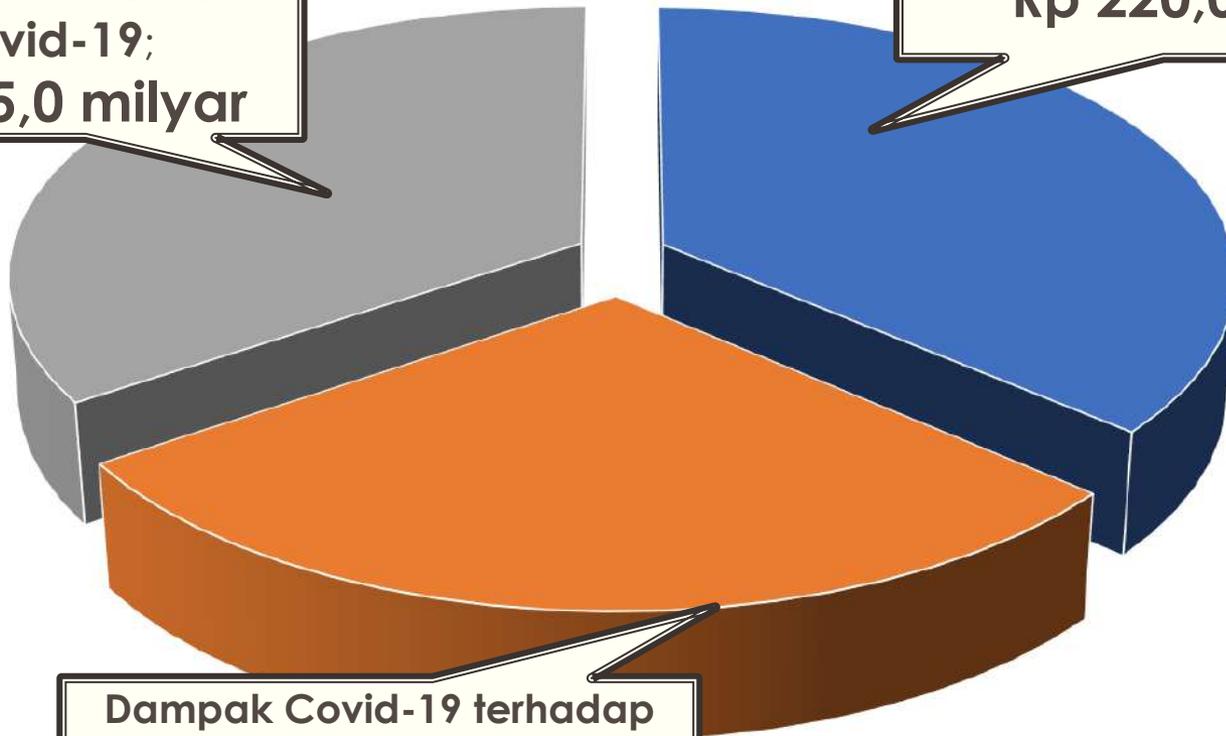


# Hasil realokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 kelompok penanganan kegiatan pandemi COVID-19

Kesehatan terkait Covid-19;  
Rp 275,0 milyar

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi;  
Rp 220,0 milyar

Dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial;  
Rp 261,0 milyar



---

---

**Skema Kebijakan Penanganan  
Kesehatan Covid-19**

**Paket 1,**  
Kegiatan  
secara  
Niskala  
(spiritual)

**Skema Pertama  
(Penanganan Kesehatan  
berbasis Desa Adat)  
Rp. 75,0 milyar**

**Paket 2,**  
Kegiatan  
secara  
Sekala  
(Duniawi)



# Skema Kebijakan Penanganan Kesehatan Covid-19

Paket  
**2**

Pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19

Penyediaan tempat Karantina di hotel dan tempat lain bagi tenaga medis, PMI, ABK, termasuk bantuan kabupaten/kota

Paket  
**3**

Paket  
**1**

Pelayanan di RS PTN UNUD, RSUP Sanglah, dan RS Bali Mandara

**Skema Kedua**  
(Penanganan Kesehatan Gugus Tugas Pemprov Bali)

**Rp. 200,0 milyar**

Bantuan insentif bagi tenaga medis

Paket  
**4**

Dukungan kegiatan operasional Gugus Tugas Provinsi

Paket  
**5**

**Skema Pertama**  
(Kelompok usaha informal)

**Paket 1**, Kelompok Usaha informal (warung tradisional, pedagang pasar, industri rumah tangga, nelayan, dan peternak);

**Paket 2**, Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

**Skema Kedua**  
(Kelompok Koperasi)

**Paket 1**, Koperasi binaan Pemerintah Provinsi Bali

**Paket 2**, Koperasi binaan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Skema Kebijakan  
Penanganan  
Dampak Covid-19  
Terhadap Ekonomi  
**Rp. 220,0 Milyar**

**Skema Ketiga**  
(Kelompok Usaha Media)

**Paket 1**, Usaha media cetak

**Paket 2**, Usaha media online

## Skema Pertama

Penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin berbasis Desa Adat berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 149,0 milyar.

Bantuan diberikan kepada Krama Desa Adat yang ada di 1.493 Desa Adat. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

**Skema Kebijakan  
Penanganan Dampak  
Covid-19 Terhadap  
Masyarakat Dalam  
Bentuk Jaring  
Pengaman Sosial (JPS)  
Rp. 261,0 Milyar**

## Skema Kedua

Penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112,0 milyar)



---

**Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan dampak COVID-19 berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada Kelompok Masyarakat**

- Paket 1,** Keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Paket 2,** Kelompok pekerja formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang dirumahkan tanpa dibayar oleh perusahaan bidang pariwisata, perdagangan, dan industri.
- Paket 3,** Kelompok pekerja informal (buruh lepas, sopir, dan tukang parkir).
- Paket 4,** Bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan swasta, yang orang tuanya terkena dampak COVID-19, dengan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- Paket 5,** Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang orang tuanya atau yang bersangkutan terkena dampak COVID-19, berupa subsidi biaya pendidikan semester.

Thank you...